



RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SUNAN MURIA NO. 9 KODE POS 59313 KUDUS TELP. (0291) 438713

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	68
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	76

3.3	Rencana Tindak Pengendalian Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	78
3.4	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	83
3.5	Pentahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	86
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH..	89
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	89
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	94
4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	122
4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	124
BAB V	PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenjang Pendidikan	23
Tabel 2.2	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan/Non Golongan	24
Tabel 2.3	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Jabatan/Eselon	25
Tabel 2.4	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	25
Tabel 2.5	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Teknis	26
Tabel 2.6	Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Fungsional	26
Tabel 2.7	Sarana Prasarana Ruangan	27
Tabel 2.8	Sarana Mobilitas	27
Tabel 2.9	Sarana Peralatan Perkantoran	27
Tabel 2.10	Sarana Mebelair	28
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.3.6	Capaian Kinerja SDGs Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ...	53
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	55

Tabel 2.16 Mitra Kerja Perangkat Daerah	62
Tabel 2.17 Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	63
Tabel 2.18 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	66
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	70
Tabel 3.2 Strategi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	76
Tabel 3.3 Rencana Tindak Pengendalian Resiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	79
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	83
Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi Kabupaten Kudus	87
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025-2029	89
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	95
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD (IKU) Perangkat Daerah	124
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD (IKK) Perangkat Daerah	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	22
--	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.


Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dalam upaya turut serta berperan mewujudkan tercapainya visi misi Bupati Periode 2025-2030 dalam membangun Kabupaten Kudus.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun bertujuan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya Perangkat Daerah yang ada yang meliputi sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi serta mengintegrasikan berbagai kebijakan dan strategi yang relevan dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini, diharapkan organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan program-program strategis secara lebih efektif, efisien dan terukur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Semoga Renstra ini dapat menjadi langkah awal menuju terwujudnya organisasi yang lebih maju dan berkelanjutan.

Kudus, 15 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,**



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Rembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah hadir untuk melaksanakan pembangunan daerah untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya, mendukung pada aspek daya saing. Pembangunan yang dilakukan selalu dimulai dengan perencanaan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya dapat efektif, efisien dan tepat.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang dioperasionalkan dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, di tingkat perangkat daerah, dalam menyusun renstra perangkat daerah harus memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat perangkat daerah, disusun berpedoman RPJMD dan bersifat indikatif. Namun seiring dengan perkembangan regulasi dalam perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam SIPD, maka renstra PD memuat juga subkegiatan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Selanjutnya, Renja PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 135);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kudus;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

Tujuan ditetapkannya Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029

- 3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Rencana Tindak Pengendalian Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.5 Pentahapan Pembangunan renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Rencana Strategis OPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- b. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi

- dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
 - g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;
 - i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Smart City;
 - j. Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK- Metra);
 - l. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
 - n. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
 - o. Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
 - p. Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
 - q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - r. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
 - s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian

penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;

- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtangga di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya dilingkungan Dinas;
8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja;

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu

kedinasan;

9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
 10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
 11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
 12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;

- f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;
- g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
- k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
- n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;
- o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
- q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi

- dan profesionalisme;
- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
 - t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;

- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. Pengelolaan dan pengembangan *Smart City*;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;
- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan *Open Data*;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;
- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi *e-government* di Daerah;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
 - g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan *Open Data* di Daerah;
 - h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun *database* yang ada di Daerah;
 - i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
 - j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
 - k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
 - n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - o. Menyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
 - p. Menyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
 - q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
 - r. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik;

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

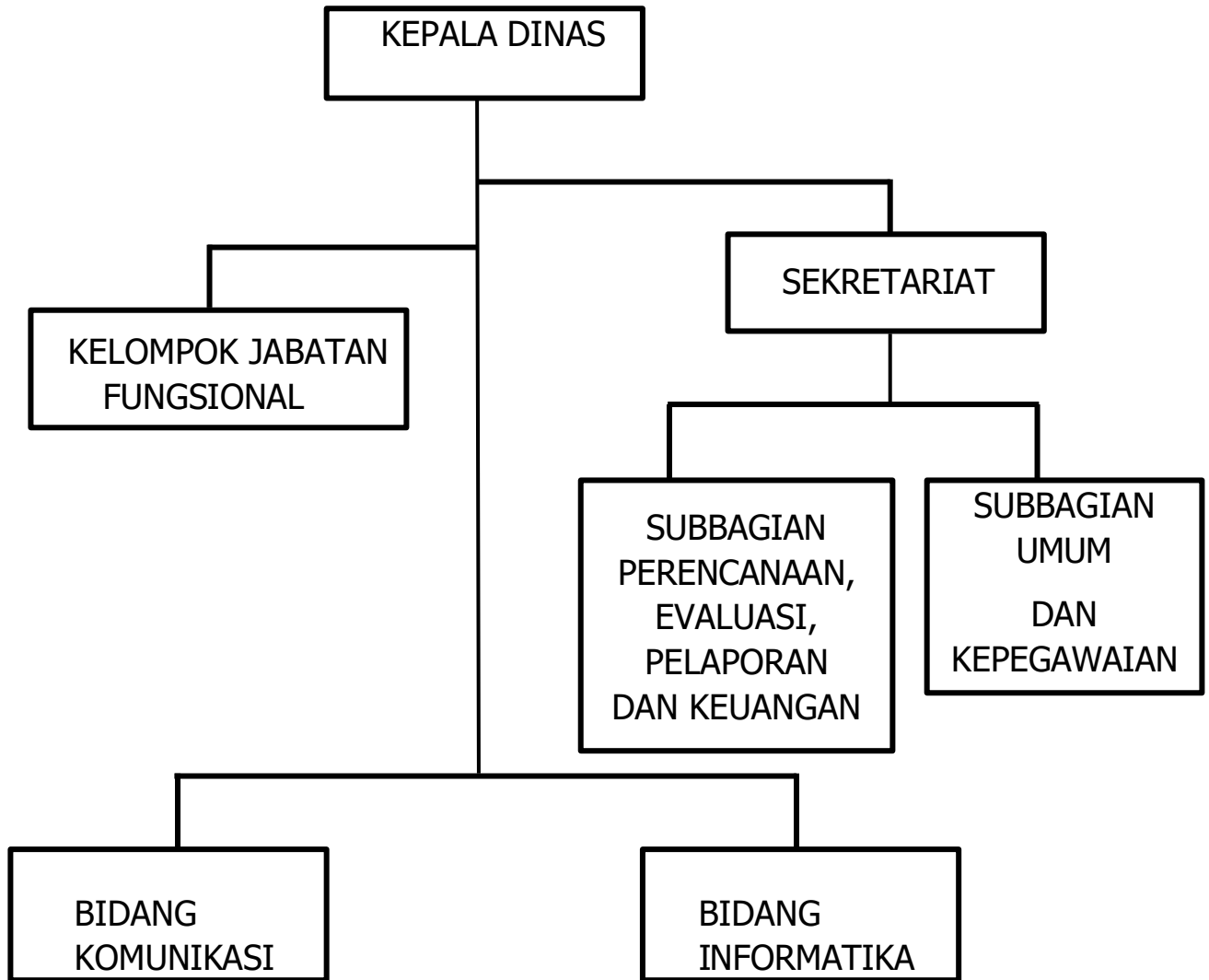
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing;
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.

- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama;
- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- d. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya. Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan Jenjang Pendidikan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	ASN				Non ASN			
		Jumlah (pegawai)		Persentase (%)		Jumlah (pegawai)		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	S2	1	3	3,57	10,72	-	-	-	-
2	S1/D4	10	7	35,71	25,01	14	3	77,78	16,67
3	D3	2	1	7,14	3,57	-	-	-	-
4	SMA/Sederajat	1	2	3,57	7,14	1	-	5,565	-
5	SMP/Sederajat	1	0	3,57	-	-	-	-	-
6	SD/MI	0	0	-	-	-	-	-	-
Jumlah		15	13	53,56	46,43	15	3	83,33	16,67
Jumlah pegawai ASN/Non ASN		28				18			
Jumlah total pegawai (ASN & Non ASN)		46							

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan/Non Golongan

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan Golongan/Non Golongan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kudus
Berdasarkan Golongan/Non Golongan

No.	Golongan/Ruang	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1.	I/a	-	-	-	-
2	I/b	-	-	-	-
3	I/c	-	-	-	-
4	I/d	-	-	-	-
5	II/a	1	0	100	0
6	II/b	-	-	-	-
7	II/c	-	-	-	-
8	II/d	0	1	0	100
9	III/a	4	4	50	50
10	III/b	2	1	66,7	33,3
11	III/c	1	1	50	50
12	III/d	3	2	60	40
13	IV/a	1	2	33,3	67
14	IV/b	1	0	100	0
15	IV/c	-	-	-	-
16	IV/d	-	-	-	-
17	V	-	-	-	-
18	VI	-	-	-	-
19	VII	1	1	50	50
	IX	1	1	50	50
20	PHD	-	-	-	-
21	Tenaga Kontrak /Outsourcing	11	3	78,6	21,4
	Jumlah	26	16	63,9	46,1
	Jumlah Pegawai	42			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

c. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan Jabatan/Eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kudus
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Eselon II	1	3,57
2.	Eselon III	3	10,72
3.	Eselon IV	2	7,14
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	13	46,43
5.	Jabatan Fungsional Umum	9	32,14
Jumlah Pegawai		28	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

d. Jumlah pegawai berdasarkan yang telah mengikuti Diklat

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan yang telah mengikuti Diklat adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.4, Tabel. 2.5, Tabel 2.6

Tabel 2.4
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan
telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti	Jumlah Pegawai yang seharusnya mengikuti	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	ADUM / Diklat Pim IV	2	2	33,2
2.	SPAMA / Diklat Pim III	2	3	33,2
3.	SPAMEN / Diklat Pim II	1	1	16,6
Jumlah		5	6	83

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.5
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Teknis

No.	Jenis Diklat Teknis	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti
1	2	3
1.	Diklat Teknis	28
Jumlah		28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.6
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Fungsional

No.	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti
1	2	3
1.	Diklat Fungsional	28
Jumlah		28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Dari tabel tersebut, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kompetensi teknis maupun kompetensi jabatan fungsional sehingga dicapai peningkatan pengetahuan, keterampilan, kualitas pelayanan publik dan keahlian pegawai. Meski begitu, pada bidang Informatika masih didapati kekurangan pegawai dengan kompetensi teknis tertentu, misalnya Sandiman dan Manggala Informatika sehingga terjadi peningkatan beban kerja dan tentunya bisa menghambat penyelesaian tugas.

2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Ruangan

No.	Rincian	Jumlah Ruang
1	2	3
1	Ruang Kepala Dinas	1
2	Ruang Sekretaris Dinas	1
3	Ruang Sekretariat	1
4	Ruang Bidang	2
5	Ruang Pertemuan	1
6	Ruang Arsip	1
7	Ruang Podcast	1
8	Ruang NOC	1
Jumlah		9

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.8
Sarana Mobilitas

No.	Rincian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1.	Mobil	6	6	-
2.	Sepeda Motor	6	6	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.9
Sarana Peralatan Perkantoran

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	GPS	1	1	-
2	Alat Penghancur Kertas	1	1	-
3	LCD Proyektor	4	4	-
4	Lemari Es	1	1	-
5	AC Sentral	5	5	-
6	AC Split	18	18	-
7	Televisi	4	4	-
8	Amplifier	1	1	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
9	Dispenser	1	1	-
10	Handy Cam	3	3	-
11	Komputer PC	21	21	-
12	Laptop	16	16	-
13	Notebook	13	13	-
14	Scanner	3	3	-
15	Printer	14	14	-
16	Hardisk Eksternal	10	10	-
17	Server	10	10	-
18	Wireless Access Point	112	112	-
19	Kamera Elektronik	9	9	-
20	Tripod Camera	8	8	-
21	Lensa Kamera	2	2	-
22	Headset	11	11	-
23	Lampu Blitz Kamera	1	1	-
24	Alat Studio Video Lainnya	14	14	-
25	Telephone Mobile	4	4	-
26	Handy Talky (HT)	8	8	-
27	Pemancar	1	1	-
28	Komputer Jaringan Lainnya	408	408	-
29	Router	47	47	-
30	Switch	95	95	-
31	Microphone	14	14	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 2.10
Sarana Mebelair

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Lemari Besi	6	6	-
2	Kursi Kayu	1	1	-
3	Rak Besi	2	2	-
4	Lemari Kaca	9	9	-
5	Meja Kayu	20	20	-
6	Meja Resepsionis	2	2	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
7	Kursi Rapat	16	16	-
8	Kursi Besi	46	46	-
9	Kursi Putar	3	3	-
10	Meja Tamu	2	2	-
11	Meja Rapat	18	18	-
12	Sofa	2	2	-
13	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-
14	Gambar Presiden / Wakil Presiden	1	1	-
15	Alat Pemadam	5	5	-
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	-
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	1	-
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	-
23	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1	-
24	Lemari buku untuk Perpustakaan	10	10	-
25	Papan Pengumuman	22	22	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa seluruh sarana prasarana yang digunakan guna menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan cukup memadai. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pada bidang informatika, yakni peralatan maupun aplikasi infomatika sehingga masih terdapat penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang belum terintegrasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menjalankan 3 (tiga) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi *enabler* pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat karena berkaitan dengan teknologi, informasi dan komunikasi serta pemerintahan digital. Terciptanya pemerintahan berbasis digital (*e-government*) menjadi prasyarat utama pembangunan menuju tata kelola

pemerintahan yang baik.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Ruang lingkup kinerja urusan Komunikasi dan Informatika adalah komunikasi publik yang berarti bagaimana penyebaran informasi kebijakan dan program pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Berikutnya penyiaran dan media, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelayanan informatika dan e-Government melalui digitalisasi pelayanan pemerintahan. Regulasi dan pengawasan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi juga menjadi bagian dari kinerja urusan komunikasi dan informatika. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan TIK secara cerdas dan aman sebagai bagian dari literasi digital harus dikawal sebagai bentuk dukungan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan agenda peningkatan literasi digital masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berkinerja dalam upaya menjalankan mandat tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Berikut capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika:

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	Persen	100	100	100	100	100
	Nilai Survey Kepuasan Publik terhadap konten yang dipublikasikan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	83.70
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain Tata Kelola	Nilai	2.43	1.90	3.00	4.40	3.90

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Dari tabel tersebut, cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media mengindikasikan capaian maksimal yakni, sebesar 100% per tahun. Hal ini menandakan masyarakat dapat menerima informasi secara utuh dan

menyeluruh. Adapun nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan pada tahun 2024 sebesar 83,70 . akan tetapi indicator tersebut belum tergolong SMART sehingga dilakukan perubahan indicator program di Tahun 2024 yaitu Nilai Survey Kepuasan Publik terhadap konten yang dipublikasikan. Nilai domain tata kelola SPBE menunjukkan sejauh mana tata Kelola SPBE sesuai dengan standar dan kerangka kerja yang berlaku. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik implementasi SPBE. Tata Kelola SPBE terdiri dari beberapa aspek, yaitu: Perencanaan strategis SPBE, Teknologi informasi dan komunikasi, Penyelenggara SPBE. Indikator penilaian SPBE domain tata kelola meliputi: Arsitektur SPBE, Pembangunan aplikasi pelayanan OPD. Tantangan kinerja urusan komunikasi dan informatika ke depan adalah bagaimana meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika dengan optimalisasi sumberdaya TIK yang dimiliki.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. IPS juga digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di berbagai instansi. Meskipun sempat menurun di 2023, tren kenaikan di 2024 menunjukkan perbaikan dalam sistem statistik. Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan ini, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan data serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi statistik.

Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	N/A	2.70	2.10	2.88

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk pengamanan informasi. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat untuk mengevaluasi kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan keamanan informasi. Indeks ini dirancang untuk membantu organisasi menilai sejauh mana mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman. Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan pesat dari 96 (2020) hingga 499 (2024) dengan kategori tinggi, yang menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keamanan siber di berbagai sektor. Terjadi kenaikan signifikan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari tahun ke tahun dikarenakan sudah disusunnya dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan sudah diterapkan pada keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah melaksanakan audit eksternal terhadap penerapan prosedur SMKI yang sebelumnya belum dilaksanakan. Namun, dengan semakin canggihnya ancaman siber, investasi dalam teknologi, regulasi, dan pelatihan harus terus ditingkatkan agar keamanan informasi tetap terjaga.

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANNAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	96	170	247	324	499

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

2.3.4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020- 2024

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat dari evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya dari Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Indikator Tujuan :																			
1	Indeks SPBE				2.35	2.56	2.68	2.87	4.23	3.08	2.53	3.38	4.23	4.23	131.1%	98.8%	126.1%	147.4%	100.0%
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				77	78	79	81	93.84	92.3	88.44	85.95	93.84	88.18	119.9%	113.4%	108.8%	115.9%	94.0%
3	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100.0%	100.0%	100.0%	-	-
4	Persentase fasilitasi persandian				12%	15%	18%	24%	-	44%	12%	82%	24%	-	366.7%	80.0%	455.6%	-	-
5	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah				-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Indikator Sasaran :																			
1	Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2.35	2.56	2.68	2.87	-	3.08	2.53	3.38	4.23	-	131.1%	98.8%	126.1%	147.4%	-
2	Nilai evaluasi SAKIP				82	85	87	91	-	72.3	74.14	82.37	70.95	-	88.2%	87.2%	94.7%	78.0%	-
3	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-
4	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-
5	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian				12%	15%	18%	24%	-	44%	12%	82%	24%	-	366.7%	80.0%	455.6%	100.0%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks SPBE				-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	4.23	-	-	-	-	120.9%
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)				-	-	-	-	93.84	-	-	-	-	88.18	-	-	-	-	94.0%
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah				-	-	-	-	82.39	-	-	-	-	74.8	-	-	-	-	90.8%
Indikator Program																			
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah				79	83	83	84	-	85.62	85.87	87.17	81.37	-	108.4%	103.5%	105.0%	96.9%	
2	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
3	Kebijakan Internal SPBE				2.35	2.59	3.06	3.06	-	3.12	3.90	2.3	3.90	-	132.8%	150.6%	75.2%	127.5%	
4	Tata Kelola SPBE				1.86	2.29	2.43	2.43	-	2.43	3.00	1.9	3.00	-	130.6%	131.0%	78.2%	123.5%	
5	Layanan SPBE				2.61	2.7	2.7	3.03	-	3.39	3.82	3.49	3.82	-	129.9%	141.5%	129.3%	126.1%	
6	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
7	Persentase Fasilitasi persandian				12%	15%	18%	24%	-	44%	12%	82%	24%	-	366.7%	80.0%	455.6%	100.0%	
1	Nilai SPBE domain tata kelola				-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	121.9%
2	Indeks Pembangunan Statistik				-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	2.88	-	-	-	-	102.9%
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				-	-	-	-	250	-	-	-	-	324	-	-	-	-	129.6%
4	Nilai Survey Kepuasan Publik				-	-	-	-	82	-	-	-	-	83.7	-	-	-	-	102.1%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)				-	-	-	-	43	-	-	-	-	39	-	-	-	-	90.7%
Indikator Kegiatan																			
1	Jumlah pe OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)				8	-	4	11	-	8	-	4	11	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	-
2	Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar				3	-	29	12	-	3	-	29	12	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	-
3	Jumlah Laporan BMD /sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar				16	-	16	16	-	16	-	16	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	-
4	Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID				177	-	177	177	-	177	-	177	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	
5	Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)				20	-	20	20	-	20	-	20	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data				5	-	6	6	-	5	-	6	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	
7	Jumlah Regulasi Aplikasi				2	-	3	3	-	1	-	3	-	-	50.0%	-	100.0%	0.0%	
8	Jumlah Publikasi Data statistik				4	-	4	4	-	4	-	4	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	
9	Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi				1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	
10	Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)					8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
11	Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar						29	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah						1	1	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	
13	Tersosialisasinya kebijakan cukai kepada masyarakat						2400	-	-	-	2400	-	-	-	-	100.0%	-	-	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantora				-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
15	Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor				-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
16	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standa				-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
17	Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran				-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
18	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik				-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
19	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan				-	209	-	-	-	-	209	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
20	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah				-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50.0%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral				-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
22	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi				-	2	-	-	-	-	18	-	-	-	-	900.0%	-	-	-
23	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja PD				-		83.5	-	-	-	-	87.33	-	-	-	-	104.6%	-	-
24	Jumlah alat tulis kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjalanan dinas				-		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-
25	Jumlah pengadaan mebelair dan peralatan gedung kantor				-		12	-	-	-	-	21	-	-	-	-	175.0%	-	-
26	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standa				-		7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100.0%	-	-
27	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				-		12	-	-	-	-	13	-	-	-	-	108.3%	-	-
28	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik				-		20	-	-	-	-	14	-	-	-	-	70.0%	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	Jumlah layanan egovernment				-	-	10	-	-	-	-	18	-	-	-	-	180.0%	-	-
30	Jumlah Publikasi Data statistik				-	-	20	-	-	-	-	254	-	-	-	-	1270.0%	-	-
31	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi				-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	100.0%	-	-
32	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar				-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100.0%	-
33	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar				-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%	-
34	Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar				-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-
35	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar				-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-
36	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar				-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%	-
37	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)				-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100.0%	-
38	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan				-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar				-	-	-	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	100.0%	-
40	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten				-	-	-	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	100.0%	-
41	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan				-	-	-	209	-	-	-	-	209	-	-	-	-	100.0%	-
42	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data				-	-	-	127	-	-	-	-	127	-	-	-	-	100.0%	-
43	Jumlah dokumen statistik sektoral				-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-
44	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi				-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100.0%	-
45	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik				-	-	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100.0%
46	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data				-	-	-	-	94	-	-	-	-	94	-	-	-	-	100.0%
47	Persentase ketercukupan data statistik sektoral				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
48	Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian				-	-	-	-	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
50	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
51	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
52	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
53	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun				-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.0%
54	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
55	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
56	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
57	Persentase BMD dalam kondisi baik				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%
Indikator Subkegiatan					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
1	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar				-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
2	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah				-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar				-	22	27	-	-	-	25	23	-	-	-	113.6%	85.2%	-	-
4	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN				-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
5	Jumlah pelaporan keuangan				-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
6	Jumlah jasa jaminan milik daerah				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
7	Jumlah sosialisasi ke masyarakat				-	60	100	-	-	-	60	100	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
8	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai peraturan perundang-undangan tentang ASN				-	NA	27	-	-	-	NA	23	-	-	-	NA	85.2%	-	-
9	Jumlah alat tulis kantor				-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
10	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
11	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				-	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
12	Jumlah bahan bacaan				-	8	96	-	-	-	8	79	-	-	-	100.0%	82.3%	-	-
13	Jumlah perjalanan dinas				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
14	Jumlah mebelair				-	4	21	-	-	-	4	21	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
15	Jumlah peralatan gedung kantor				-	8		-	-	-	8		-	-	-	100.0%		-	-
16	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat				-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
17	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-
19	Jumlah jasa administrasi keuangan				-	1	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-
20	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas				-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
21	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja				-	9	9	-	-	-	9	9	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
22	Jumlah opini dan aspirasi publik				-	2		-	-	-	2	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
23	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				-		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.0%	-	-
24	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah				-	200	200	-	-	-	191	455	-	-	-	95.5%	227.5%	-	-
25	Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional				-	5		-	-	-	5		-	-	-	100.0%		-	-
26	Jumlah konten yang dikelola				-		824	-	-	-	-	320	-	-	-		38.8%	-	-
27	Jumlah pengelolaan PPID				-	2		-	-	-	2		-	-	-	100.0%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani				-	-	15	-	-	-	-	54	-	-	-	-	360.0%	-	-
29	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi				-	60		-	-	-	60	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
30	Jumlah konferensi pers				-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	66.7%	-	-
31	Jumlah FK Metra				-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100.0%	-	-
32	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten				-	-	58	-	-	-	-	58	-	-	-	-	100.0%	-	-
33	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi				-	5		-	-	-	5	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
34	Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik				-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100.0%	-	-
35	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik				-	20		-	-	-	8	-	-	-	-	40.0%	-	-	-
36	Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah				-	-	20	-	-	-	-	209	-	-	-	-	1045.0%	-	-
37	Jumlah sistem komunikasi intra pemerintah				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-
38	Prosentase Layanan SPBE				-	-	50	-	-	-	-	73	-	-	-	-	146.0%	-	-
39	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah				-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11.1%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan				-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	300.0%	-	-
41	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah				-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	100.0%	100.0%	-	-
42	Jumlah dokumen smart city				-		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-
43	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT				-	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
44	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral				-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
45	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100.0%	-	-
46	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan				-	-	60	-	-	-		60	-	-	-	-	100.0%	-	-
47	Jumlah aplikasi yang terlindungi				-	50	-	-	-	-	64	-	-	-	-	128.0%	-	-	-
48	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi				-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	166.7%	-	-
49	Jumlah layanan keamanan informasi				-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
50	Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit				-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100.0%	-	-
51	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				-	-	-	209	209	-	-	-	209	209	-	-	-	100.0%	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%
53	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				-	-	-	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	150.0%	100.0%
54	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%
55	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%
56	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				-	-	-	200	60	-	-	-	200	70	-	-	-	100.0%	116.7%
57	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				-	-	-	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-	100.0%	100.0%
59	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				-	-	-	5	8	-	-	-	5	8	-	-	-	100.0%	100.0%
60	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				-	-	-	200	215	-	-	-	579	461	-	-	-	289.5%	214.4%
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				-	-	-	214	263	-	-	-	274	238	-	-	-	128.0%	90.5%
62	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				-	-	-	20	25	-	-	-	12	26	-	-	-	60.0%	104.0%
63	Jumlah Layanan Hubungan Media				-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100.0%	100.0%
64	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100.0%	100.0%
65	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	6	5	-	-	-	6	5	-	-	-	100.0%	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	-	-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	100.0%	100.0%
67	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	100.0%	100.0%
68	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				-	-	-	24	28	-	-	-	23	28	-	-	-	95.8%	100.0%
69	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%
70	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%
71	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%
72	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	-	-	3	3	-	-	-	3	6	-	-	-	100.0%	200.0%
73	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				-	-	-	12800	2000	-	-	-	12800	2000	-	-	-	100.0%	100.0%
74	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				-	-	-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100.0%	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100.0%	100.0%
76	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				-	-	-	6	7	-	-	-	6	7	-	-	-	100.0%	100.0%
77	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%
78	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%
79	jumlah paket mebel yang disediakan				-	-	-	5	2	-	-	-	5	2	-	-	-	100.0%	100.0%
80	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				-	-	-	6	6	-	-	-	6	6	-	-	-	100.0%	100.0%
81	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100.0%	100.0%
82	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.0%	100.0%
84	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				-	-	-	70	50	-	-	-	70	50	-	-	-	100.0%	100.0%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

2.3.5. Capaian Kinerja SDGs Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berperan dalam penyediaan data, penyebaran informasi dan pemanfaatan teknologi. Capaian kinerja SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3.6

Capaian Kinerja SDGs Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Capaian SDGs yang diampu PD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	NA	NA	81.4	95	95	NA	NA	81.4	98.33	95	NA	NA	100%	97%	100%
2	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	NA	NA	81.4	95	82.04	NA	NA	81.4	81.75	82.04	NA	NA	100%	116%	100%
3	Proporsi individu yang menggunakan internet	NA	NA	72.14	81.4	77.68	NA	NA	72.14	81.4	77.68	NA	NA	100%	100%	100%
4	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki konsentrasi dan mendukung penuh tercapainya Sustainable Development Goals utamanya tujuan yang ke-9, yakni pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Sesuai rasio data capaian SDG's Dinas Kominfo sudah mencapai 100% untuk semua aspek. Akan tetapi, dalam pencapaian target indicator SDG's Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus masih mengalami beberapa permasalahan antara lain : belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah dan belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

2.3.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Anggaran memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan karena menjadi dasar perencanaan, alokasi sumber daya, dan pengendalian dalam penyediaan layanan. Anggaran yang dikelola dengan baik memastikan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta mendukung akuntabilitas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistika dan urusan persandian mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Sebagian kecil bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sosialisasi perundang-undangan di Bidang cukai. Berikut data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024.

Tabel 2.15
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10.2.10.01.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	2,342,267,000					2,200,755,781					93.96						
2.10.2.10.01.07.01	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	1,542,000					1,085,100					70.37						
2.10.2.10.01.07.02	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	44,125,000					36,401,300					82.50						
2.10.2.10.01.07.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	2,296,600,000					2,163,269,381					94.19						
2.10.2.10.01.19	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	10,700,216,000					10,591,516,853					98.98						
2.10.2.10.01.19.01	Pengkajian, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	47,363,000					46,814,000					98.84						
2.10.2.10.01.19.02	Penguatan SDM, Sarana Prasarana dan Penyebarluasan Informasi Publik	10,652,853,000					10,544,702,453					98.98						
2.10.2.10.01.20	Program Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	8,900,847,000					2,573,387,960					28.91						
2.10.2.10.01.20.01	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	8,704,637,000					2,386,903,184					27.42						
2.10.2.10.01.20.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Sistem Informasi	196,310,000					186,484,776					95.00						
2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	29,973,000					14,741,764					49.18						

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	29,973,000					14,741,764					49.18						
2.15.2.10.01.16	Program Pengelolaan Persandian	47,970,000					12,391,000					25.83						
2.15.2.10.01.16.01	Pengelolaan Persandian	47,970,000					12,391,000					25.83						
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		15,087,189,600	21,261,554,198	21,772,129,836	12,750,025,398		14,415,302,421	20,365,112,071	20,960,499,147	12,200,172,903		95.55	95.78	96.27	95.69		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,000,000	2,500,000	6,991,760	20,579,870		1,643,400	2,312,800	6,904,500	19,562,200		82.17	92.51	98.75	95.06		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		300,000	500,000	1,100,000	15,692,870		298,400	497,800	1,094,500	15,273,200		99.47	99.56	99.50	97.33		
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,700,000	2,000,000	5,891,760	4,887,000		1,345,000	1,815,000	5,810,000	4,289,000		79.12	90.75	98.61	87.76		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,548,495,000	3,610,691,452	3,543,241,800	3,985,866,150		3,375,814,257	3,448,361,399	3,444,818,341	3,950,283,953		95.13	95.50	97.22	99.11		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3418495000	3,533,045,452	3,470,097,000	3,910,732,000		32,552,397,707	3,379,843,999	3,377,131,841	3,875,520,753			95.66	97.32	99.10		
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		120,300,000	66,720,000	57,480,000	58,800,000		115,380,000	58,360,000	52,060,000	58,800,000		95.91	87.47	90.57	100.00		
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		9,700,000	10,926,000	15,664,800	16,334,150		8,036,550	10,157,400	15,626,500	15,963,200		82.85	92.97	99.76	97.73		
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		5,874,000	5,874,000	5,874,000	5,874,000		97.90	97.90	97.90	97.90		
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		5,874,000	5,874,000	5,874,000	5,874,000		97.90	97.90	97.90	97.90		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8,166,142,200	13,274,701,246	14,311,855,026	5,013,691,360		7,798,697,890	12,590,711,290	13,754,547,702	4,661,791,891		95.50	94.85	96.11	92.98		

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.01.01.2.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		14,600,000	74,701,246	61,855,026	57,785,160		11,680,000	31,225,000	21,878,000	40,765,000		80.00	41.80	35.37	70.55		
5.01.01.2.10	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan		8,151,542,200	13,200,000,000	14,250,000,000	4,955,906,200		7,787,017,890	12,559,486,290	13,732,669,702	4,621,026,891		95.53	95.15	96.37	93.24		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		253,911,000	265,910,700	256,058,950	240,867,350		179,507,464	255,606,919	239,726,819	233,785,434		70.70	96.13	93.62	97.06		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		21,641,000	35,240,000	54,468,000	46,499,000		21,445,000	33,940,000	43,465,000	44,703,900		99.09	96.31	79.80	96.14		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		35,302,000	33,366,750	35,362,750	23,025,000		32,614,000	32,927,500	34,442,000	20,061,000		92.39	98.68	97.40	87.13		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20,965,000	21,503,950	14,413,200	19,537,350		17,104,600	16,853,000	12,602,700	17,615,300		81.59	78.37	87.44	90.16		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000		9,060,000	10,165,000	10,440,000	10,635,000		83.89	94.12	96.67	98.47		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		165,203,000	165,000,000	141,015,000	141,006,000		99,283,864	161,721,419	138,777,119	140,770,234		60.10	98.01	98.41	99.83		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		115,639,000	52,088,000	65,290,000	53,670,000		110,777,000	50,640,000	64,950,000	52,200,000		95.80	97.22	99.48	97.26		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		26,225,000	52,088,000	15,860,000	3,857,000		21,875,000	50,640,000	15,840,000	3,600,000		83.41	97.22	99.87	93.34		
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		89,414,000		49,430,000	49,813,000		88,902,000		49,110,000	48,600,000		99.43	#####	99.35	97.56		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,765,022,400	3,799,289,800	3,285,803,200	3,175,779,668		2,724,356,722	3,768,912,415	3,189,414,415	3,042,916,983		98.53	99.20	97.07	95.82		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,990,000	2,000,000	3,500,000	3,500,000		1,986,000	1,619,750	2,057,400	1,639,050		99.80	80.99	58.78	46.83		
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2,760,920,400	3,797,289,800	3,282,303,200	3,172,279,668		2,722,370,722	3,767,292,665	3,187,357,015	3,041,277,933		98.60	99.21	97.11	95.87		
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,712,000					-					-					
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		400,000					-					-					
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		229,100,000	250,373,000	296,889,100	253,571,000		218,631,688	242,693,248	254,263,370	233,758,442		95.43	96.93	85.64	92.19		

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		199,110,000	220,383,000	247,706,100	212,260,000		189,271,688	219,418,248	227,218,370	201,413,442		95.06	99.56	91.73	94.89		
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29,990,000	29,990,000	49,183,000	41,311,000		29,360,000	23,275,000	27,045,000	32,345,000		97.90	77.61	54.99	78.30		
														####	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		9,001,225,800	11,770,472,985	11,545,474,358	9,738,525,680		8,776,177,313	11,535,654,177	11,375,357,937	9,533,474,958		97.50	98.01	98.53	97.89		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8,966,925,800	11,770,472,985	11,545,474,358	9,738,525,680		8,742,977,313	11,535,654,177	11,375,357,937	9,533,474,958		97.50	98.01	98.53	97.89		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		189,200,000	191,931,700	186,500,000	192,480,000		137,192,750	186,920,000	184,540,000	189,124,000		72.51	97.39	98.95	98.26		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		32,400,000	32,400,000	317,328,000	325,200,000		32,400,000	28,650,000	281,762,416	259,180,792		100.00	88.43	88.79	79.70		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		7,566,606,800	9,298,033,700	10,502,017,400	8,550,711,680		7,499,389,750	9,237,598,071	10,406,068,773	8,452,305,726		99.11	99.35	99.09	98.85		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik		32,900,000	99,258,000	75,676,600	82,786,000		29,557,100	87,795,039	65,728,918	71,988,440		89.84	88.45	86.86	86.96		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		-	457,039,585	243,264,658	293,825,000		-	426,549,250	219,974,830	274,716,000			93.33	90.43	93.50		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		-	150,000,000	50,000,000	53,180,000		-	140,921,000	49,950,000	52,730,000			93.95	99.90	99.15		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		43,000,000	364,944,000	170,687,700	240,343,000		42,900,000	354,403,200	167,333,000	233,430,000		99.77	97.11	98.03	97.12		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		1,137,119,000	1,176,866,000				1,034,737,713	1,072,817,617				91.00	91.16				

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		10,787,837,700	2,748,160,988	2,153,691,545	2,786,425,600		3,106,038,727	2,512,901,277	1,955,764,720	2,488,335,807		28.79	91.44	90.81	89.30		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10,263,221,700	1,789,764,438	1,450,092,245	2,458,098,600		2,751,678,822	1,630,095,700	1,302,501,993	2,197,604,391		26.81	91.08	89.82	89.40		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		10,263,221,700	1,789,764,438	1,450,092,245	2,458,098,600		2,751,678,822	1,630,095,700	1,302,501,993	2,197,604,391		26.81	91.08	89.82	89.40		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		524,616,000	958,396,550	703,599,300	328,327,000		354,359,905	882,805,577	653,262,727	290,731,416		67.55	92.11	92.85	88.55		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		195,837,000	381,252,750	172,766,500	59,822,000		61,196,561	367,489,500	152,539,700	57,445,000		31.25	96.39	88.29	96.03		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			145,039,800	154,590,800	105,600,000			141,829,177	144,917,637	98,948,663			97.79	93.74	93.70		
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		238,128,000	252,740,000				215,563,344	249,384,960				90.52	98.67	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		90,651,000	179,364,000	376,242,000	162,905,000		77,600,000	124,101,940	355,805,390	134,337,753		85.60	69.19	94.57	82.46		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		124,159,000	67,382,600	136,036,000	90,600,000		72,097,000	57,289,080	97,469,310	73,782,062		58.07	85.02	71.65	81.44		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		124,159,000	67,382,600	136,036,000	90,600,000		72,097,000	57,289,080	97,469,310	73,782,062		58.07	85.02	71.65	81.44		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		124,159,000	51,620,000	120,023,400	25,600,000		72,097,000	50,437,800	82,981,710	13,497,000		58.07	97.71	69.14	52.72		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			15,762,600	16,012,600	65,000,000			6,851,280	14,487,600	60,285,062			43.47	90.48	92.75		

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		243,300,000	111,596,660	52,033,010	434,803,000		218,895,065	46,630,579	32,829,667	408,184,022		89.97	41.78	63.09	93.88		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		243,300,000	111,596,660	52,033,010	434,803,000		218,895,065	46,630,579	32,829,667	408,184,022		89.97	41.78	63.09	93.88		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		200,000,000	91,161,650	34,855,000	337,150,000		199,320,000	36,235,179	18,135,167	321,926,760		99.66	39.75	52.03	95.48		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		43,300,000	20,435,010	17,178,010	97,653,000		19,575,065	10,395,400	14,694,500	86,257,262		45.21	50.87	85.54	88.33		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Dari tabel tersebut di atas, alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami fluktuasi namun masih sesuai dengan yang ditargetkan. Besaran rasio antara realisasi dan anggaran terbilang terjadi peningkatan meski pada beberapa program terjadi stagnasi maupun penurunan. Hal itu disebabkan masih belum optimalnya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar dan belum maksimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menjadi tujuan utama dan menerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Mereka adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus dari upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah. Kelompok sasaran ini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dengan mengetahui siapa yang menjadi sasaran, perangkat daerah dapat:

a. Merancang program yang tepat guna:

Program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, sehingga lebih efektif dan efisien.

b. Memastikan program tepat sasaran:

Penyaluran manfaat program dapat lebih tepat sasaran, sehingga menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa bantuan atau layanan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat:

Dengan mengetahui kelompok sasaran, perangkat daerah dapat melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

d. Mengevaluasi dampak program:

e. Dengan memantau kinerja program terhadap kelompok sasaran, perangkat daerah dapat mengevaluasi dampak dari program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan memahami siapa kelompok sasaran layanan perangkat daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan bidang statistika dan urusan pemerintahan bidang persandian memiliki kelompok – kelompok sasaran baik dari instansi vertikal, dari sektor pemerintahan, sektor swasta maupun dari unsur masyarakat. Kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yaitu :

- a. Masyarakat, menjadi sasaran layanan dalam hal penyediaan informasi publik berupa kebijakan Pemerintah Daerah dan pelayanan pengaduan.
- b. Pemerintahan Daerah, menjadi sasaran layanan dalam hal layanan internet, aplikasi, data statistic serta keamanan informasi. Pemerintahan Dearah meliputi Perangkat Daerah, Unit kerja serta Pemerintahan Desa.

Selain kelompok sasaran pelayanan, terdapat juga mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Berikut gambaran mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Tabel 2.16
Mitra Kerja Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat	Mitra PD
1	2	3
1	BAPPEDA Kabupaten Kudus	Sekretariat , Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
2	BPPKAD Kabupaten Kudus	Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3	BKPSDM Kabupaten Kudus	Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5	FK-Metra	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Badan Pusat Statistik	Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Badan Siber dan Sandi Negara	Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum pembahasan tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Menentukan permasalahan perangkat daerah dari mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari analisis atas evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada tahun sebelumnya serta pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah.	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika pada Perangkat Daerah; b. Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional; c. Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE; d. belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
		b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.	a. belum optimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral. b. Belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar c. Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan statistik dalam perencanaan pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		c. Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	a. kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal. b. Belum optimalnya sistem kerja atau Kerangka kerja keamanan informasi
2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	a. belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat; b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik; c. belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu tersebut, maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah “belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi”. Berikut Isu

Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2025-2029.

Tabel 2.18
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	<p>- Masalah Pokok : Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi</p> <p>- Masalah :</p> <p>a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah.</p> <p>b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.</p> <p>c. Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah</p> <p>- Akar Masalah :</p> <p>a.1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika pada Perangkat Daerah;</p> <p>a.2. Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional;</p> <p>a.3. Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE;</p> <p>a.4. belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.</p> <p>b.1. belum optimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.</p> <p>b.2. Belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar</p>	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas fiskal.	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Transformasi digital	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b.3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan statistik dalam perencanaan pembangunan</p> <p>c.1. kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal.</p> <p>c.2. Belum optimalnya sistem kerja atau Kerangka kerja keamanan informasi</p>					
	<p>- Masalah Pokok : Keterbukaan informasi publik belum optimal</p> <p>- Masalah : Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</p> <p>- akar masalah :</p> <p>a. belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat;</p> <p>b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik;</p> <p>c. belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.</p>					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”.

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
2. Mandiri Kesehatan dan berdikari;
3. Pendidikan berkarakter, kearifan budaya;
4. Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI;
5. Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup;
6. Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang professional dan inovatif;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. maka sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pada misi ke-6 Terwujudnya tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif.

Selaras dengan arah pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 serta menganalisis rumusan visi, misi, permasalahan dan isu strategis pembangunan maka tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tujuannya adalah Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital. Sedangkan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital;
2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Meningkatnya keamanan informasi.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keterkaitan antara dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran Rencana strategis yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>a. Mendukung transformasi digital sektor publik (RPJMN 2025-2029)</p> <p>b. Mendukung tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif, melalui pemerintahan digital (RPJMD 2025-2029)</p>	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>a. Indeks Pemerintahan Digital yang dinilai dari 9 aspek, yaitu Aspek Strategi dan Rencana (5%), Aspek Tata Kelola dan Manajemen (5%), Aspek Teknologi Digital (20%), Aspek Audit Teknologi Digital (6%), Aspek Keamanan Siber (9%), Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital (10%), Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (10%), Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerinatah (15%), Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (20%).</p> <p>b. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan:</p>	Indeks	NA / 4.23	NA / 4.23	1 / 4.25	1.2 / 4.27	1.3 / 4.29	1.5 / 4.31	1.6 / 4.33

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/scor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5 adalah skor maksimal.								

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a. Mendukung terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah melalui SPBE dan melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Kominfo RI) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika)		Meningkatnya Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/Indeks SPBE domain layanan SPBE	a. Indeks Pemerintahan Digital Aspek Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah dilihat dari indikator : tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, tingkat pemanfaatan layanan digital . b. Indeks SPBE dari Kementerian PAN RB domain layanan SPBE	Indeks	NA / 4.88	NA / 4.88	0.10/ 4.88	0.11/ 4.88	0.12/ 4.88	0.13/ 4.88	0.1/ 4.88

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien b. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) penilaian dari BPS	Indeks	2.88	2.90	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a. Melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah meliputi pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi (Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian untuk		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber	Indeks Pemerintahan Digital aspek keamanan siber dilihat dari indikator : tingkat kematangan keamanan siber, tingkat kematangan penerapan kriptografi nasional untuk keamanan data, tingkat kematangan kapabilitas penanganan insiden.	Indeks	NA	NA	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).												
Membantu terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif (sasaran RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	74.80	82.41	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

3.2. Strategi Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah mengacu pada isu strategis yang berkembang dan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi dapat ditunjukkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	1. Meningkatkan Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik	a. Mendukung transformasi digital, di sektor publik (RPJMN 25-29) b. Mendukung tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif, melalui pemerintahan digital (RPJMD 25-29)	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	- Meningkatkan integrasi aplikasi layanan - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	
			Mendukung terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah melalui SPBE dan melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Komunikasi	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola Teknologi Informasi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan keterbukaan informasi publik	dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika)	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	- Meningkatkan layanan pengaduan elektronik - Meningkatkan keterbukaan badan publik - meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik	
	2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sektoral	a. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien b. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral	
	3. Meningkatnya keamanan informasi	penguatan keamanan informasi	Melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah meliputi pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi (Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	- melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah - meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah - meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan kinerja di tingkat PD	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan pengendalian kinerja pemerintah yang efektif	- optimalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah - optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terstandar - meningkatkan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

3.3. Rencana Tindak Pengendalian Strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Tindak Pengendalian Strategis (RTPS) atau Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah dokumen yang berisi rencana aksi untuk mengendalikan risiko dan memastikan pencapaian tujuan instansi pemerintah. Penyusunan RTP melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- a. Identifikasi Risiko: Menentukan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam organisasi;
- b. Penilaian Risiko: Menilai tingkat risiko, termasuk probabilitas dan dampaknya;
- c. Penentuan Kegiatan Pengendalian: Merancang kegiatan pengendalian untuk mengatasi risiko;
- d. Penyusunan Dokumen: Menyusun dokumen RTP yang berisi rencana aksi pengendalian;
- e. Implementasi dan Pemantauan: Melaksanakan rencana aksi pengendalian dan memantau pelaksanaannya.

Dengan adanya RTP, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu mengelola risiko dengan baik. Berikut gambaran Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO INHEREN	SEBAB	DAMPAK TERHADAP TUJUAN/SASARAN	PENGENDALIAN TERPASANG (PENGENDALIAN YANG TELAH ADA)	SKALA RISIKO RESIDUAL
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						
Sasaran I : Meningkatnya Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/Indeks SPBE domain layanan SPBE	Gangguan teknis pada layanan publik berbasis elektronik	6	Infrastruktur yang kurang memadai, belum adanya pemantauan secara real time	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah	Pemanfaatan pusat kendali pemerintah	2
		Interoperabilitas antar sistem	6	Sistem aplikasi tidak terintegrasi, menimbulkan duplikasi data	Duplikasi data, proses birokrasi lambat, dan pengambilan keputusan tidak akurat	Arsitektur SPBE, Tim Koordinasi SPBE, Perbup SPBE	2

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO INHEREN	SEBAB	DAMPAK TERHADAP TUJUAN/SASARAN	PENGENDALIAN TERPASANG (PENGENDALIAN YANG TELAH ADA)	SKALA RISIKO RESIDUAL
		Lambatnya Tanggapan atas aduan	9	Sistem pengaduan tidak responsif, atau tidak ada mekanisme umpan balik yang efektif	Menurunnya kepuasan masyarakat atas layanan publik	1. Memberikan pelatihan kepada petugas layanan publik. 2. Melakukan Evaluasi bulanan terhadap penyelesaian keluhan.	4
		Manipulasi data, penyalahgunaan sistem layanan berbasis elektronik untuk keuntungan pribadi	8	Kelemahan sistem pengamanan digital	Kepercayaan masyarakat pengguna layanan menurun	Implementasi keamanan siber yang ketat, pemantauan dan evaluasi secara berkala	2
Sasaran 2 : statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Metadata statistik tidak tersedia atau tidak sesuai standar nasional	4	Kurangnya pemahaman produsen data terkait metadata statistik	Pengguna tidak memahami konteks data	Supervisi dari Pembina data	1
		Variabel data tidak sesuai dengan kode referensi nasional	6	Tidak tersedia kode referensi terbaru	Integrasi data sektoral terganggu	Penggunaan referensi yang sudah ada	2
		Data belum diperbarui secara berkala	4	Belum terdapat jadwal pemutakhiran data	Menurunnya kredibilitas data statistik sektoral	Pemutakhiran data yang belum terjadwal, permintaan data oleh walidata	1
		Penyalahgunaan metode analisis data yang dapat merusak validitas data yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan materiil	6	Proses pengolahan dan analisis data yang tidak transparan atau rentan terhadap kesalahan	Pengambilan kebijakan berdasarkan data yang tidak valid atau salah dapat mengarah pada keputusan yang kurang tepat	Implementasi sistem informasi yang aman untuk mengolah data dan mencegah manipulasi atau kehilangan data	2

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO INHEREN	SEBAB	DAMPAK TERHADAP TUJUAN/SASARAN	PENGENDALIAN TERPASANG (PENGENDALIAN YANG TELAH ADA)	SKALA RISIKO RESIDUAL
Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber	Keamanan siber dan perlindungan data pribadi	6	Terjadi kebocoran atau peretasan data pengguna layanan digital pemerintah	Kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan publik, potensi sanksi hukum	Firewall, backup database, Tim CSIRT	2
		Penyalahgunaan akses yang bisa mengakibatkan kebocoran data sensitif untuk mendapatkan keuntungan pribadi	6	Kelalaian dalam mengkonfigurasi sistem keamanan atau pembaruan perangkat lunak yang dapat meninggalkan celah bagi pihak tidak bertanggung jawab	Serangan siber atau peretasan dapat merusak atau menghentikan layanan digital pemerintah mengganggu pelayanan publik	1. Pembaruan sistem perangkat lunak aplikasi untuk melindungi dari ancaman siber terbaru 2. Penggunaan enkripsi data, autentikasi dua faktor (2FA) dan firewall untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses tidak sah	2
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Penilaian Kinerja Rendah	6	Lemahnya perencanaan, penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi	Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah	Tinjau kembali Dokumen Perencanaan, tetapkan Indikator kinerja tepat, katikan Anggaran dengan Kinerja, tingkatkan Pengukuran Kinerja, kuatkan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta kuatkan komitmen dan kapasitas SDM yang menangani	2
					Pemerintah Daerah tidak mendapat insentif dari Pemerintah Pusat		

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO INHEREN	SEBAB	DAMPAK TERHADAP TUJUAN/SASARAN	PENGENDALIAN TERPASANG (PENGENDALIAN YANG TELAH ADA)	SKALA RISIKO RESIDUAL
		Penganggaran Tidak Efisien	6	Program dan kegiatan tidak tepat sasaran	Pemborosan anggaran	Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Optimalisasi Proses dan Tata Kelola	2
				Program dan kegiatan tidak berdasarkan data perencanaan	Pemerintah Daerah mendapat penilaian negatif dari masyarakat		
				Adanya pesanan anggaran dari pemangku kepentingan			
		Penyelewengan anggaran	6	Lemahnya pengawasan internal	Pegawai terkena sanksi administrasi	Penyusunan Anggaran Partisipatif, Prosedur Standar yang Ketat, menerapkan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi, Penegakan hukum, sanksi yang tegas dan konsisten, pengawasan anggaran secara ketat	2
					Terdapat temuan BPK		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah mengacu pada isu strategis yang berkembang dan menjadi focus utama pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	1. Meningkatnya Informasi dan komukinasi layanan publik berbasis digital	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik	a. Mendukung transformasi digital, di sektor publik (RPJMN 25-29) b. Mendukung tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif, melalui pemerintahan digital (RPJMD 25-29)	Penguatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik	- Meningkatkan integrasi aplikasi layanan - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan keterbukaan informasi publik	Mendukung terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah melalui SPBE dan melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika)	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola Teknologi Informasi	
				Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	- Meningkatkan layanan pengaduan elektronik - Meningkatkan keterbukaan badan publik - Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik	
	2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sektoral	a. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien b. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	3. Meningkatnya keamanan informasi	Penguatan keamanan informasi	Melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah meliputi pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi (Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).	Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah - Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah - Meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah 	
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan kinerja di tingkat PD	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan pengendalian kinerja pemerintah yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah - Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terstandar - Meningkatkan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas 	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

3.5. Pentahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. Dengan demikian satu sasaran dapat dilakukan dalam satu periode lima tahunan, bahkan dapat juga lebih dari satu periode pentahapan lima tahunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai agenda utama Kepala Perangkat Daerah. Tahapan dan skala prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah. Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing sasaran strategis dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Penetapan tema tahapan Renstra menggambarkan urutan prioritas waktu pelaksanaan rencana pembangunan sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan secara simultan. Berikut gambaran pentahapan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2029.

Tabel 3.5
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1	2	3	4	5
Meningkatkan integrasi aplikasi layanan	Inventarisasi aplikasi dan layanan, identifikasi kebutuhan pengguna	Penyusunan arsitektur layanan terpadu, pembangunan platform integrasi	Pengembangan API, perencanaan data yang akan dilakukan migrasi	Automasi proses bisnis	Pemanfaatan teknologi lanjutan (menggunakan teknologi AI)
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	Inventarisasi seluruh infrastruktur TIK eksisting	Pembangunan infrastruktur utama, melakukan kolaborasi antar pihak (pemerintah, swasta, masyarakat)	Pengembangan pusat data untuk mendukung kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan data	Peningkatan kualitas layanan dan penguatan keamanan siber	Implementasi layanan publik berbasis digital
Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola Teknologi Informasi	Pemetaan terhadap kompetensi, keahlian, dan sertifikasi yang dimiliki, perumusan rencana pengembangan individu	Menyelenggarakan pelatihan dasar dan sertifikasi	Mentoring dan coaching (transfer pengetahuan antara senior dan junior)	Berpartisipasi dalam seminar dan komunitas profesional	Pengukuran kinerja berbasis hasil
Meningkatkan layanan pengaduan elektronik	Evaluasi dan pemetaan sistem pengaduan elektronik yang sudah ada. Pemutakhiran regulasi daerah terkait pengelolaan pengaduan elektronik, serta perancangan arsitektur sistem pengaduan terintegrasi berbasis multi-kanal	Pengembangan dan uji coba aplikasi pengaduan elektronik terpadu, pelatihan petugas pengelola pengaduan tingkat kecamatan/kelurahan, serta pembuatan dashboard monitoring dan pelaporan pengaduan	Peluncuran resmi layanan pengaduan elektronik kota/kabupaten, integrasi sistem dengan kanal eksternal (media sosial, aplikasi publik), serta implementasi fitur klasifikasi otomatis berbasis AI sederhana	Evaluasi kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan, pengembangan fitur pelacakan dan notifikasi pengaduan masyarakat, serta penilaian responsivitas dan pemberian penghargaan bagi OPD responsif	Perluasan penggunaan sistem ke tingkat desa/kelurahan, peningkatan sistem keamanan data dan aksesibilitas bagi disabilitas, serta penyesuaian sistem dengan standar nasional/internasional layanan publik
Meningkatkan keterbukaan badan publik	Penyusunan roadmap keterbukaan informasi, penguatan PPID, dan audit keterbukaan di OPD	Implementasi e-PPID, pelatihan ASN mengenai keterbukaan, dan evaluasi keterbukaan tiap OPD	Pengembangan dashboard monitoring keterbukaan dan pemanfaatan teknologi AI untuk klasifikasi informasi publik	Penilaian mandiri keterbukaan informasi berbasis indikator dan penghargaan untuk OPD dengan kinerja terbaik	Reviu roadmap keterbukaan informasi untuk periode 2031-2035 dan konsolidasi sistem e-PPID dengan sistem pelayanan publik

Arah Kebijakan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penyusunan standar informasi publik, revitalisasi kanal digital, dan pelatihan SDM komunikasi publik	Pembentukan tim redaksi informasi publik dan kampanye komunikasi berbasis data	Produksi konten multimedia dengan berkolaborasi bersama media lokal dan influencer daerah	Implementasi smart communication system (notifikasi multi-channel) dan evaluasi efektivitas komunikasi digital	Penyesuaian strategi komunikasi publik dengan tren media baru dan finalisasi strategi jangka panjang komunikasi publik
Penyusunan daftar data dan metadata statistik sektoral	Identifikasi daftar data, penentuan kebutuhan metadata	Penyusunan standar metadata, validasi dan verifikasi data	Penyusunan pedoman teknis	Mengembangkan portal data yang interaktif	Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal, lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau publik
Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Iventarisasi semua aset informasi yang krusial, identifikasi potensi ancaman dan kerentanan (serangan siber/kebocoran data)	Pembentukan tim pengelola keamanan informasi	Pelatihan dan literasi terkait keamanan siber	Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis standar internasional seperti ISO	Instansi menjadi rujukan bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keamanan informasi dan persandian
Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	Identifikasi kompetensi pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	Menyusun pedoman kerja untuk semua tugas keamanan informasi, mulai dari penanganan insiden hingga manajemen risiko	Menyelenggarakan pelatihan terkait keamanan informasi seperti analisis forensik digital, manajemen risiko, dan penetration testing	Melakukan evaluasi kinerja terhadap pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	Melakukan pengembangan proyek inovasi, seperti metodologi baru untuk deteksi ancaman siber
Meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah	Identifikasi titik kelemahan pada infrastruktur TIK eksisting, menyusun rencana kebutuhan software dan hardware yang diperlukan	Menerapkan standar teknis untuk semua perangkat keamanan informasi	Pengadaan fasilitas sarana pendukung berdasarkan rencana kebutuhan	Melakukan simulasi dan uji kerentanan secara berkala	Fasilitas yang ada memungkinkan untuk beralih dari metode reaktif (bereaksi terhadap serangan) menjadi proaktif(mencegah serangan sebelum terjadi)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program perangkat daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pendanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam indikasi rencana program yang memuat semua program beserta indikator, target, pagu indikatif penyelenggaraan semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus. Berikut ini diuraikan program beserta fokus yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif	T1 Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				T1 Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		S1.1 Meningkatnya Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital			S1.1 Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/ Indeks SPBE domain layanan SPBE		
			OC1.1.1 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		OC1.1.1 Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah	PROG 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OT1.1.1.1 Jasa Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OT1.1.1.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	KEG 1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Relasi Media	
						SUBKEG 1.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						SUBKEG 1.1.3 Pelayanan Informasi Publik	
						SUBKEG 1.1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						SUBKEG 1.1.5 Diseminasi Informasi	
						SUBKEG 1.1.6 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			OC1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		OC.1.1.2 Nilai IPD aspek Layanan Digital / Indeks SPBE aspek Tatakelola	PROG 1 Pengelolaan aplikasi informatika	
				OT1.1.1.2 Jasa Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OT1.1.2.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	KEG 1.1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					OT1.1.2.2 Persentase RT dengan akses internet (IUP)		
						SUBKEG 1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
						SUBKEG 1.1.2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						SUBKEG 1.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG 1.1.4. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						SUBKEG 1.1.5. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 1.1.6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						SUBKEG 1.1.7. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		S1.2 Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			S1.2 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			OC1.2.1 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		OC1.2.1 Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan	PROG 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				OT1.1.2.1 Dokumen Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	OT1.2.1 Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	KEG 1.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						SUBKEG 1.1.2. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	
		S1.3 Meningkatnya keamanan informasi			S1.3 Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber		
			OC1.3.1 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		OC1.3.1 Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROG 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OT1.1.3.1 Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	OT1.3.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah	KEG 1.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 1.1.2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		S1.4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			S1.4 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		
			OC1.4.1 Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah		OC1.4.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo) (nilai)	PROG 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				OT1.1.1 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.1.1 Presentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	KEG1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	
				OT1.1.2 Jasa Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN , Jasa Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN	OT1.1.2 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA (persen)	KEG1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG 1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						SUBKEG 1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				OT1.1.3 Dokumen perencanaan BMD Perangkat Daerah dan Jasa Pengamanan BMD Perangkat Daerah	OT1.1.3 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset (persen)	KEG 1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				OT1.1.4 - Jasa Peningkatan Kapasitas Pegawai - Jasa pelaksanaan peraturan sosialisasi perundangan-undangan di bidang cukai	OT1.1.4 Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran setahun (persen)	KEG 1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						SUBKEG 1.1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				OT1.1.5 Barang kebutuhan administrasi umum kantor yang disediakan	OT1.1.5 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar (persen)	KEG 1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						SUBKEG 1.1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						SUBKEG 1.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						SUBKEG 1.1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						SUBKEG 1.1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						SUBKEG 1.1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT1.1.6 Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	OT1.1.6 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan (persen)	KEG 1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						SUBKEG 1.1.6.1 Pengadaan Mebel	
						SUBKEG 1.1.9.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
						SUBKEG 1.1.9.2 Pengadaan Saranan Dan Prasaran Gedung kantor atau bangunan lainnya	
				OT1.1.7 Jasa Pembayaran penunjang kantor	OT1.1.7 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu (persen)	KEG 1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						SUBKEG 1.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						SUBKEG 1.1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						SUBKEG 1.1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT1.1.8 Jasa Pemeliharaan BMD	OT1.1.8 Persentase BMD dalam kondisi baik(persen)	KEG 1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						SUBKEG 1.1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						SUBKEG 1.1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Rencana program perangkat daerah tahun 2025-2030. Rencana kerja yang tertuang dalam Dokumen RPJMD disusun berdasarkan evaluasi pembangunan dan memuat program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Berikut ini diuraikan program beserta fokus yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Program 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				8.387.689.252,00		8.323.612.457		8.472.432.025		8.336.743.135		8.643.017.107		
Outcome Program 1.1 Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah	Indikator Outcome Program 1.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo) (nilai)	39,0	44,0	8.387.689.252,00	45	8.323.612.457	46	8.472.432.025	47	8.336.743.135	48	8.643.017.107		
Kegiatan 1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.604.000		11.704.000		11.804.000		11.904.000		11.950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Kegiatan 1.1.1 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Output Kegiatan 1.1.1 Presentase capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100	100	11.604.000	100	11.704.000	100	11.804.000	100	11.904.000	100	11.950.000		
Sub Kegiatan 1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Output Sub Kegiatan 1.1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	13	14	8.424.000	14	8.424.000	14	8.524.000	14	8.524.000	14	8.524.000		
Sub Kegiatan 1.1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output Sub Kegiatan 1.1.1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.1.2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	10	3	795.000	5	795.000	5	795.000	5	895.000	5	895.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Output Sub Kegiatan 1.1.1.3 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.1.3 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	NA	1	2.385.000	1	2.485.000	1	2.485.000	1	2.485.000	1	2.531.000		
Kegiatan 1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.940.949.000		4.960.949.000		5.097.162.568		4.982.161.883		5.259.092.855		
Output Kegiatan 1.1.2 Jasa Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN, Jasa Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator Output Kegiatan 1.1.2 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA (persen)	100	100	4.940.949.000	100	4.960.949.000	100	5.097.162.568	100	4.982.161.883	100	5.259.092.855		
Sub Kegiatan 1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Output Sub Kegiatan 1.1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28	34	4.857.954.000	34	4.877.669.000	34	5.002.562.568	34	4.887.831.883	34	5.159.342.855		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Output Sub Kegiatan 1.1.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	73.980.000	12	73.980.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000		
Sub Kegiatan 1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Output Sub Kegiatan 1.1.2.3 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	9.015.000	12	9.300.000	12	9.600.000	12	9.330.000	12	9.750.000		
Kegiatan 1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Output Kegiatan 1.1.3 Dokumen perencanaan BMD Perangkat Daerah dan Jasa Pengamanan BMD Perangkat Daerah	Indikator Output Kegiatan 1.1.3 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset (persen)	100	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
Output Sub Kegiatan 1.1.3.1 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.3.1 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
Kegiatan 1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				470.217.000		471.217.000		472.217.000		473.217.000		474.217.000		
Output Kegiatan 1.1.4 Jasa Peningkatan Kapasitas Pegawai, Jasa pelaksanaan peraturan sosialisasi perundangan-undangan di bidang cukai	Indikator Output Kegiatan 1.1.4 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun (persen)	12	12	470.217.000	12	471.217.000	12	472.217.000	12	473.217.000	12	474.217.000		
Sub Kegiatan 1.1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Output Sub Kegiatan 1.1.4.1 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	3	45.217.000	3	46.217.000	3	47.217.000	3	48.217.000	3	49.217.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Output Sub Kegiatan 1.1.4.2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.4.2 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan (orang)	500	500	425.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000	500	425.000.000		
Kegiatan 1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.786.352		224.786.352		225.786.352		226.786.352		227.786.352		
Output Kegiatan 1.1.5 Barang kebutuhan administrasi umum kantor yang disediakan	Indikator Output Kegiatan 1.1.5 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar (persen)	100	100	223.786.352	100	224.786.352	100	225.786.352	100	226.786.352	100	227.786.352		
Sub Kegiatan 1.1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output Sub Kegiatan 1.1.5.1 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.5.1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	40	40	34.815.252	40	35.015.252	40	35.215.252	40	35.415.252	40	35.615.252		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Output Sub Kegiatan 1.1.5.2 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.5.2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	26.400.600	1	26.600.600	1	26.800.600	1	27.000.600	4	27.200.600		
Sub Kegiatan 1.1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	7	7	8.604.500	7	8.804.500	7	9.004.500	7	9.204.500	7	9.404.500		
Sub Kegiatan 1.1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	12.960.000	12	13.160.000	12	13.360.000	12	13.560.000	12	13.760.000		
Sub Kegiatan 1.1.5.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.5.3 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	141.006.000	12	141.206.000	12	141.406.000	12	141.606.000	12	141.806.000		
Kegiatan 1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				237.572.000		151.291.205		154.695.205		134.805.000		155.000.000		
Output Kegiatan 1.1.6 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Indikator Output Kegiatan 1.1.6 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan (persen)	100	100	237.572.000	100	151.291.205	100	154.695.205	100	134.805.000	100	155.000.000		
Sub Kegiatan 1.1.6.1 Pengadaan Mebel														
Output Sub Kegiatan 1.1.5. Tersedianya Mebel	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.6.1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	2	11	14.705.000	2	14.805.000	2	14.905.000	2	14.805.000	2	15.000.000		
Sub Kegiatan 1.1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya														
Output Sub Kegiatan 1.1.9.1 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.9.1 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	0	17	222.867.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	80.209.795	2	100.209.795		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.6.3 Pengadaan Saranan Dan Prasaran Gedung kantor atau bangunan lainnya														
Output Sub Kegiatan 1.1.9.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.9.2 Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6	0	0	1	36.486.205	1	39.790.205	1	39.790.205	1	39.790.205		
Kegiatan 1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.234.174.900		2.234.274.900		2.240.374.900		2.236.474.900		2.242.574.900		
Output Kegiatan 1.1.7 Jasa Pembayaran penunjang kantor	Indikator Output Kegiatan 1.1.7 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu (persen)	100	100	2.234.174.900	100	2.234.274.900	100	2.240.374.900	100	2.236.474.900	100	2.242.574.900		
Sub Kegiatan 1.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	4	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	1.672.414.900	12	1.672.514.900	12	1.678.614.900	12	1.674.714.900	12	1.680.814.900		
Sub Kegiatan 1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.7.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		28	557.760.000	28	557.760.000	28	557.760.000	28	557.760.000	28	557.760.000		
Kegiatan 1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263.386.000		263.390.000		264.392.000		265.394.000		266.396.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Kegiatan 1.1.8 Jasa Pemeliharaan BMD	Indikator Output Kegiatan 1.1.8 Persentase BMD dalam kondisi baik (persen)	100	100	263.386.000	100	263.390.000	100	264.392.000	100	265.394.000	100	266.396.000		
Sub Kegiatan 1.1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Output Sub Kegiatan 1.1.8.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.8.1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	12	228.920.000	12	228.920.000	12	229.421.000	12	229.922.000	12	230.423.000		
Sub Kegiatan 1.1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Output Sub Kegiatan 1.1.8.2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Output Sub Kegiatan 1.1.8.2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	50	50	34.466.000	50	34.470.000	50	34.971.000	50	35.472.000	50	35.973.000		
Program 1.2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				3.677.101.288		3.647.511.176		3.716.234.771		3.653.574.810		3.795.009.491		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Outcome Program 1.2 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indikator Outcome Program 1.2 Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah	10,1	12,1	3.677.101.288	13,1	3.647.511.176	14,1	3.716.234.771	15,1	3.653.574.810	16,1	3.795.009.491		
Kegiatan 1.2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Output Kegiatan 1.2.1 Jasa Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Output Kegiatan 1.2.1 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)	NA	70,37	3.677.101.288	70,40	3.647.511.176	70,43	3.716.234.771	70,46	3.653.574.810	70,49	3.795.009.491		
Sub Kegiatan 1.2.1.1 Relasi Media														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 1.2.1.1 Terlaksananya Relasi Media	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.1 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (laporan)	NA	2	357.022.000	3	357.022.000	3	357.022.000	4	357.022.000	4	357.022.000		
Sub Kegiatan 1.2.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
Output Sub Kegiatan 1.2.1.2 Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.2 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (komunitas)	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
Sub Kegiatan 1.2.1.3 Pelayanan Informasi Publik														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 1.2.1.3 Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.3 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (permohonan)	NA	25	47.904.000	25	47.904.000	25	47.904.000	25	47.904.000	25	47.904.000		
Sub Kegiatan 1.2.1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
Output Sub Kegiatan 1.2.1.4 Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.4 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (rekomendasi)	NA	52	189.850.000	52	189.850.000	52	189.850.000	52	189.850.000	52	189.850.000		
Sub Kegiatan 1.2.1.5 Diseminasi Informasi														
Output Sub Kegiatan 1.2.1.5 Terlaksananya Diseminasi Informasi	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.5 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (persen)	NA	100	1.970.656.200	100	1.941.066.088	100	2.009.789.683	100	1.947.129.722	100	2.088.564.403		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.2.1.6 Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
Output Sub Kegiatan 1.2.1.6 Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Indikator Output Sub Kegiatan 1.2.1.6 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (media)	NA	2	1.061.669.088	2	1.061.669.088	2	1.061.669.088	2	1.061.669.088	2	1.061.669.088		
Program 1.3 Pengelolaan aplikasi informatika				945.428.560		937.820.574		955.490.266		939.379.609		975.744.228		
Outcome Program 1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indikator Outcome Program 1.3 Nilai IPD aspek Layanan Digital (nilai)	NA	0,10	945.428.560	0,11	937.820.574	0,12	955.490.266	0,13	939.379.609	0,14	975.744.228		
	Indikator Outcome Program 1.3 Indeks SPBE aspek Tatakelola (indeks)	4,88	4,88		4,88		4,88		4,88		4,88			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kegiatan 1.3.1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		NA		945.428.560		937.820.574		955.490.266		939.379.609		975.744.228		
Output Kegiatan 1.3.1 Jasa Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Indikator Output Kegiatan 1.3.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (persen)	NA	100	945.428.560	100	937.820.574	100	955.490.266	100	939.379.609	100	975.744.228		
	Indikator Output Kegiatan 1.3.1 Persentase RT dengan akses internet (IUP)	NA	75,77		76,85		77,92		78,99		80,06			
Sub Kegiatan 1.3.1.1 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE														
Output Sub Kegiatan 1.3.1.1 Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.1 Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE (dokumen)	NA	1	56.360.000	1	55.332.000	1	53.270.000	1	50.495.000	1	48.592.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sub Kegiatan 1.3.1.2 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
Output Sub Kegiatan 1.3.1.2 Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.2 Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	NA	33	700.452.760	33	692.413.374	33	705.076.766	33	690.446.039	33	720.575.228		
Sub Kegiatan 1.3.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
Output Sub Kegiatan 1.3.1.3 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.3 Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (dokumen)	NA	1	5.278.000	-	5.274.500	1	6.582.500	-	6.235.000	1	6.982.000		
Sub Kegiatan 1.3.1.4 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 1.3.1.4 Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.4 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (aplikasi)	NA	2	61.360.000	1	75.332.000	1	80.640.000	1	79.854.000	1	82.750.000		
Sub Kegiatan 1.3.1.5 Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah														
Output Sub Kegiatan 1.3.1.5 Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.5 Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (laporan)	NA	1	95.016.800	1	89.990.000	1	90.795.000	1	91.550.000	1	97.670.000		
Sub Kegiatan 1.3.1.6 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 1.3.1.6 Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.6 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	NA	2	18.591.000	1	12.938.700	1	11.570.000	1	13.679.000	1	11.632.500		
Sub Kegiatan 1.3.1.7 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
Output Sub Kegiatan 1.3.1.7 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Indikator Output Sub Kegiatan 1.3.1.7 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Laporan)	NA	1	8.370.000	1	6.540.000	1	7.556.000	1	7.120.570	1	7.542.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program 2.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				69.222.000		68.664.962		69.958.694		68.779.110		71.441.640		
Outcome Program 2.1 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indikator Outcome Program 2.1 Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan (%)	87	93	69.222.000	96	68.664.962	100	69.958.694	100	68.779.110	100	71.441.640		
Kegiatan 2.1.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				69.222.000		68.664.962		69.958.694		68.779.110		71.441.640		
Output Kegiatan 2.1.1 Dokumen Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	Indikator Output Kegiatan 2.1.1 Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	69.222.000	100	68.664.962	100	69.958.694	100	68.779.110	100	71.441.640		
Sub Kegiatan 2.1.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 2.1.1.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Indikator Output Sub Kegiatan 2.1.1.1 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (orang)	NA	180	36.304.000	180	35.795.000	180	37.520.000	180	36.792.500	180	37.595.000		
Sub Kegiatan 2.1.1.2 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar														
Output Sub Kegiatan 2.1.1.2 Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Indikator Output Sub Kegiatan 2.1.1.2 Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (persen)	NA	100	32.918.000	100	32.869.962	100	32.438.694	100	31.986.610	100	33.846.640		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Program 3.1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				95.894.000		95.122.329		96.914.550		95.280.460		98.968.892		
Outcome Program 3.1 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indikator Outcome Program 3.1 Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)	54,36	55,56	95.894.000	56,64	95.122.329	57,73	96.914.550	58,82	95.280.460	59,91	98.968.892		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kegiatan 3.1.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				95.894.000		95.122.329		96.914.550		95.280.460		98.968.892		
Output Kegiatan 3.1.1 Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Indikator Output Kegiatan 3.1.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah (indeks)	499	510	95.894.000	520	95.122.329	530	96.914.550	540	95.280.460	550	98.968.892		
Sub Kegiatan 3.1.1.1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
Output Sub Kegiatan 3.1.1.1 Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 3.1.1.1 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	NA	8	16.452.000	4	17.415.000	4	19.937.000	4	20.646.921	4	19.639.000		
Sub Kegiatan 3.1.1.2 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Ket.	
			2026		2027			2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Output Sub Kegiatan 3.1.1.2 Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Indikator Output Sub Kegiatan 3.1.1.1 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur Keputusan Gubernur maupun Norma Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	NA	1	79.442.000	1	77.707.329	1	76.977.550	1	74.633.539	1	79.329.892		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas merupakan komponen operasional yang bersifat strategis dan langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Berikut ini subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mendukung program prioritas pembangunan daerah :

Tabel 4.3
Tabel Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Asta Cita: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Diseminasi Informasi	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Asta Cita: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur PP Prov: Melahirkan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
				Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prog Unggulan Bupati: -
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Pengadaan Mebel	Prog Unggulan Bupati: -
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
				Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Asta Cita: - PP Prov: Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Pengadaan Saranan Dan Prasaran Gedung kantor atau bangunan lainnya	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus diperlukan penetapan indikator kinerja

program sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2025-2030 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus diuraikan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	NA	1	1.2	1.3	1.5	1.6	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.23	4.25	4.27	4.29	4.31	4.33	
3	Indeks Pemerintahan Digital Domain Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Indeks	NA	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	
4	Indeks SPBE domain layanan SPBE	Indeks	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.90	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	
6	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber	Indeks	NA	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	
7	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82.41	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Disamping ikut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus juga bertanggung jawab atas pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kudus yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian urusan Perangkat Daerah. Penetapan Indikator kinerja kunci kabupaten (IKK Outcome) yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 diuraikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD (IKK) Outcome Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	NA	1	1.2	1.3	1.5	1.6	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.23	4.25	4.27	4.29	4.31	4.33	
3	Indeks Pemerintahan Digital Domain Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Indeks	NA	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	
4	Indeks SPBE domain layanan SPBE	Indeks	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.90	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	
6	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber	Indeks	NA	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	
7	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82.41	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	
8	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	nilai	44.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	
9	Persentase capaian kinerja sub kegiatan perangkat daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
10	Persentase realisasi anggaran sesuai RKA DPA/DPPA	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
11	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
12	Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran per tahun	persen	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
13	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
14	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
15	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
16	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
17	Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah	persen	NA	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Nilai IPD aspek Layanan Digital	nilai	NA	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	
19	Indeks SPBE aspek Tatakelola	indeks	NA	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	
20	Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan	persen	NA	93.00	96.00	100.00	100.00	100.00	
21	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	persen	NA	55.56	56.64	57.73	58.82	59.91	
22	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	NA	70.37	70.4	70.43	70.46	70.49	
23	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase RT dengan akses internet (IUP)	persen	74.7	75.77	76.85	77.92	78.99	80.06	
25	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (persen)	persen	100	100	100	100	100	100	
26	Tingkat keamanan informasi pemerintah (indeks)	indeks	499	510	520	530	540	550	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD (IKK) Output Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13	13	13	13	13	13	
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	3	5	5	5	5	
3	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	NA	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	28	34	34	34	34	34	
5	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	12	12	12	12	
6	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
7	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	3	3	3	3	3	
9	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	orang	500	500	500	500	500	500	
10	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	40	40	40	40	40	40	
11	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1	1	
12	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	7	7	7	7	7	
13	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	
14	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	
15	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	11	2	2	2	2	
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	4	4	4	4	4	
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	NA	28	28	28	28	28	
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12	12	12	12	12	
20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	50	50	50	50	50	
21	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	NA	17	2	2	2	2	
22	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	unit	6	-	1	1	1	1	
23	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	NA	2	3	3	4	4	
24	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	komunitas	NA	1	1	2	2	2	
25	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	permohonan	NA	25	25	25	25	25	
26	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	NA	52	52	52	52	52	
27	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	persen	NA	100	100	100	100	100	
28	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	NA	2	2	2	2	2	
29	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	dokumen	NA	1	1	1	1	1	
30	Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	NA	33	33	33	33	33	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	NA	1	-	1	-	1	
32	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	aplikasi	NA	2	1	1	1	1	
33	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	laporan	NA	1	1	1	1	1	
34	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Laporan Pemerintah Daerah	aplikasi	NA	2	1	1	1	1	
35	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	laporan	NA	1	1	1	1	1	
36	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	orang	NA	180	180	180	180	180	
37	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	persen	NA	100	100	100	100	100	
38	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	NA	8	4	4	4	4	
39	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	dokumen	NA	1	1	1	1	1	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025–2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 sampai dengan Renja Tahun 2030. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 - 2030 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci serta sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 Dinas Komunikasi dan Informatika memanfaatkan secara maksimal Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang dimiliki serta mengoptimalkan kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mengingat perubahan yang sangat pesat, kompleks dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan/penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Kudus, 15 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, ✓**



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002